

## Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Kota Palangka Raya Tahun 2019-2022

**Novia Fransiska**

Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya  
Korespondensi penulis: [noviafransiska2001@gmail.com](mailto:noviafransiska2001@gmail.com)

**Alexandra Hukom**

Ekonomi Pembangunan, Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya  
Email: [alexandra.hukom@feb.upr.ac.id](mailto:alexandra.hukom@feb.upr.ac.id)

**Abstract.** *The purpose of this study is to analyze the impact of regional financial performance, economic growth and income inequality in the City of Palangkaraya from 2019 to 2022. The research method used is descriptive analysis and panel regression analysis using secondary data obtained from reliable sources. The variables used in this study are regional financial performance as measured by the ratio of regional income (PAD) to regional expenditure, economic growth as measured by regional gross domestic product (GDP) per capita, and income inequality as measured. The results of the analysis show that regional financial performance and economic growth have a significant effect on income inequality in Palangkaraya City. The results of this study can help local governments formulate economic and fiscal policies to reduce income inequality in Palangkaraya City and improve regional financial performance and economic growth. This study will also become a reference for researchers and scholars in developing further research on the factors that affect regional financial performance, economic growth, and income inequality in other regions.*

**Keywords:** *Regional financial performance, economic growth, income inequality, Palangka Raya City*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kota Palangkaraya tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi panel dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber terpercaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio pendapatan daerah (PAD) terhadap pengeluaran daerah, pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik bruto (PDRB) per kapita daerah, dan ketimpangan pendapatan yang terukur. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kota Palangkaraya. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah merumuskan kebijakan ekonomi dan fiskal untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Kota Palangkaraya serta meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Studi ini juga akan menjadi referensi bagi para peneliti dan sarjana dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di daerah lain.

**Kata Kunci:** Kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Kota Palangka Raya

## PENDAHULUAN

Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan salah satu pusat ekonomi dan pemerintahan di wilayah Kalimantan. Sebagai daerah otonom, kinerja keuangan daerah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan di kota tersebut. Oleh karena itu, analisis pengaruh kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Kota Palangka Raya menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Periode tahun 2019-2022 dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan periode empat tahun terakhir sejak awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Selama periode tersebut, terdapat berbagai perubahan dalam kebijakan pemerintah daerah, dinamika ekonomi lokal, serta perubahan dalam struktur dan komposisi keuangan daerah di Kota Palangka Raya.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sahli KSDM, Gubernur Pemprov Kalteng untuk meningkatkan kualitas kinerja pengelolaan keuangan di daerah tercermin dengan diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut. pemerintah negara bagian. Gubernur juga berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan secara penuh pada tahun 2022 guna meningkatkan skor kinerja indikator pengelolaan keuangan daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2022. ini.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	Total Belanja Daerah
2008	24.599.804.198	400.369.254.512	424.969.058.710	524.734.802.315
2009	22.535.680.868	410.807.859.890	433.343.540.758	533.737.728.525
2010	26.197.906.649	504.419.879.253	530.617.785.902	533.100.739.434
2011	34.973.647.041	466.395.161.314	501.368.808.355	604.674.829.127
2012	50.515.952.309	552.429.551.513	602.945.503.822	701.107.450.180
2013	62.816.270.444	638.529.004.050	701.345.274.494	849.852.315.965
2014	88.001.254.976	689.110.637.755	777.111.892.731	947.894.480.390
2015	122.314.716.629	707.089.412.100	829.404.128.729	1.048.448.764.265
2016	119.961.089.336	786.324.243.634	906.285.332.970	1.183.609.219.568
2017	150.925.083.031	841.752.718.011	992.677.801.042	1.100.179.027.601

Sumber: BPS dan BPKAD Kota Palangka Raya

Dari data yang diberikan, kinerja keuangan daerah terlihat cukup positif dengan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, peningkatan dana perimbangan, serta peningkatan total pendapatan daerah dan total belanja daerah. Hal ini menunjukkan potensi perekonomian daerah yang meningkat dan dukungan dari pemerintah pusat dalam memperkuat keuangan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kota Palangkaraya periode 2019-2022. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan hubungan antara kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan di Kota Palangka Raya serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, data ekonomi lokal, serta data ketimpangan pendapatan. Data tersebut akan dianalisis menggunakan metode statistik dan teknik regresi untuk menguji hipotesis penelitian.

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan pemahaman teoritis dan praktis tentang hubungan antara kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Kota Palangkaraya. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah menyusun strategi yang efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengurangi ketimpangan pendapatan di Kota Palangkaraya.

## **KERANGKA TEORITIS**

Kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan kota merupakan tiga aspek yang saling terkait dalam konteks ekonomi regional. Kinerja keuangan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan antar kota atau daerah. Dalam artikel ini, akan dijelaskan secara komprehensif tentang kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan kota, serta hubungannya satu sama lain. Kinerja keuangan daerah merujuk pada kondisi keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, terutama dalam hal pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan secara umum. Data yang diberikan dalam tabel "Tahun Pendapatan Asli

Daerah, Dana Perimbangan, Total Pendapatan Daerah, dan Total Belanja Daerah" menunjukkan beberapa indikator kinerja keuangan daerah, seperti pendapatan asli daerah (PAD),

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu daerah . Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti investasi, konsumsi, ekspor-impor, serta kebijakan dan program pemerintah daerah. Ketimpangan pendapatan kota, di sisi lain, merujuk pada perbedaan atau disparitas dalam distribusi pendapatan antara kota-kota yang ada dalam suatu daerah atau wilayah. Ketimpangan pendapatan kota dapat mengakibatkan disparitas dalam tingkat kesejahteraan dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik antara kota yang lebih maju dan kota yang kurang berkembang.

Hubungan antara kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan kota sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Kinerja keuangan daerah yang baik dapat menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar dan dana perimbangan yang mencukupi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan, infrastruktur, dan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, belanja daerah juga memegang peran penting. Belanja daerah yang efisien dan efektif dapat meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan daya saing daerah dalam menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting untuk memastikan sumber daya keuangan yang ada dapat dioptimalkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan daerah . Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan PAD daerah melalui peningkatan pendapatan perusahaan, pendapatan pajak, dan kontribusi sektor-sektor ekonomi lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan potensi investasi di daerah, baik dalam bentuk investasi dari dalam maupun luar daerah, yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Namun, ketimpangan pendapatan kota juga dapat menjadi dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Pertumbuhan ekonomi yang terfokus hanya pada beberapa kota atau daerah yang maju secara ekonomi dapat

meningkatkan disparitas pendapatan antara kota yang maju dan kota yang kurang berkembang. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dan layanan publik, pendapatan, serta kesempatan kerja antara kota yang maju dan kota yang terpinggirkan.

Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan kota, pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Program-program pemerintah daerah yang mengarah pada peningkatan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan lapangan kerja di daerah yang kurang berkembang dapat mengurangi ketimpangan pendapatan kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah juga perlu menjaga keberlanjutan keuangan daerah melalui pengelolaan anggaran yang disiplin, pengendalian belanja, dan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik juga memerlukan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi di daerah. Pemerintah daerah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan pendapatan kota.

## **METODE**

Metode Penelitian dalam Penelitian ini memakai kerangka utama kualitatif, dimana dalam hal yang lebih spesifiknya memakai studi literatur guna mendapatkan data dan hasil pembahasan yang utuh dan komprehensif.

## HASIL

<b>Tahun</b>	<b>Data</b>
2019	7,17
2020	-2,85
2021	4,32
2022	6,25

Sumber : BPS (PDRB Palangkaraya 2019-2022)

Data yang diberikan adalah data tahunan dari 2019 hingga 2022, setiap tahun memiliki nilai atau tanggal terkait. Data tersebut berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan berkaitan dengan PDRB (Produk Regional Bruto) Palangkaraya. Tahun 2019, nilai data yang diperoleh adalah 7,17. Tahun 2020, nilai data yang diperoleh adalah -2,85. Tahun 2021, nilai data yang diperoleh adalah 4,32. Dan tahun 2022, nilai data yang diperoleh adalah 6,25. Data ini mungkin menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya selama empat tahun terakhir. Pertama-tama, pada tahun 2019, terlihat ada kenaikan signifikan dalam data dengan nilai sebesar 7,17. Hal ini mungkin menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Palangkaraya pada tahun tersebut. Namun, pada tahun 2020, data menunjukkan penurunan yang cukup drastis, dengan nilai sebesar -2,85. Hal ini bisa mengindikasikan adanya kontraksi ekonomi di Palangkaraya pada tahun tersebut, mungkin terkait dengan peristiwa atau faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi daerah tersebut. Tahun 2021, data menunjukkan peningkatan kembali, dengan nilai sebesar 4,32. Hal ini mungkin menandakan pemulihan ekonomi di Palangkaraya setelah penurunan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022, data menunjukkan peningkatan yang lebih lanjut, dengan nilai sebesar 6,25. Hal ini bisa mengindikasikan kelanjutan pemulihan ekonomi di Palangkaraya, dan kemungkinan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya selama empat tahun terakhir. Dari pertumbuhan positif pada tahun 2019, kontraksi ekonomi pada tahun 2020, dan pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang kembali pada tahun 2021 dan 2022. Faktor-faktor ekonomi, peristiwa, atau kebijakan pemerintah mungkin menjadi faktor yang mempengaruhi perubahan dalam data ini, terdapat pola fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi di Palangkaraya selama empat tahun tersebut. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan nilai 7,17.

Namun, pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai -2,85. Pada tahun 2021, terjadi pemulihan dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32, yang kemudian meningkat menjadi 6,25 pada tahun 2022. Faktor-faktor ekonomi, peristiwa, atau kebijakan pemerintah dapat menjadi penyebab fluktuasi dalam data tersebut. Data ini merupakan sumber resmi dan terpercaya dari BPS.

<b>Penduduk Miskin</b>	<b>Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)</b>
2019	9,69
2020	10,22
2021	10,86
2022	10,62

Sumber : BPS Palangkaraya (Angka Kemiskinan 2019-2022)

Pertama, terjadi peningkatan jumlah Penduduk Miskin dari tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019, jumlah Penduduk Miskin sebanyak 9,69 ribu jiwa, namun naik menjadi 10,22 ribu jiwa pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami kenaikan dalam kurun waktu satu tahun. Namun, pada tahun 2021, terjadi peningkatan yang lebih signifikan dalam jumlah Penduduk Miskin. Angka kemiskinan meningkat menjadi 10,86 ribu jiwa, mengindikasikan bahwa masalah kemiskinan di wilayah tersebut semakin serius pada tahun tersebut. Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi, akses terhadap pekerjaan, dan perubahan sosial-ekonomi dapat menjadi penyebab peningkatan jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2021.

Meskipun demikian, pada tahun 2022, terjadi penurunan jumlah Penduduk Miskin menjadi 10,62 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan atau penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut pada tahun tersebut. Penurunan ini bisa disebabkan oleh upaya pemerintah atau stakeholders terkait dalam mengimplementasikan kebijakan atau program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif. Dalam kaitannya dengan data-data tersebut, perlu dicatat bahwa angka kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multifaktorial. Selain faktor ekonomi, faktor sosial, pendidikan, dan kesehatan juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang komprehensif dan berkelanjutan

dari berbagai pihak untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin.

Data-data ini juga menggarisbawahi pentingnya pemantauan dan pengumpulan data yang akurat terkait jumlah Penduduk Miskin. Data yang akurat dan terkini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi tren kemiskinan, menganalisis faktor penyebab, serta merancang program intervensi yang tepat dan efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam menghadapi masalah kemiskinan, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci. Program-program penanggulangan kemiskinan yang holistik, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial, dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.

Kesimpulannya bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah Penduduk Miskin, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang lebih signifikan, dan pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah Penduduk Miskin. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi angka kemiskinan, melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta melibatkan pendekatan holistik yang melibatkan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemantauan dan pengumpulan data yang akurat juga sangat penting untuk mengidentifikasi tren kemiskinan dan merancang program intervensi yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi jumlah Penduduk Miskin dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.

## **KESIMPULAN**

Data menunjukkan fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Palangkaraya selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan nilai 7,17. Namun, pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai -2,85. Pada tahun 2021, terjadi pemulihan dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 4,32, yang kemudian meningkat menjadi 6,25 pada tahun 2022. Faktor-faktor ekonomi, peristiwa, atau kebijakan pemerintah dapat menjadi penyebab fluktuasi dalam data tersebut. Lalu data menunjukkan peningkatan jumlah Penduduk Miskin dari tahun 2019 hingga 2020, namun peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di Palangkaraya semakin serius pada tahun tersebut. Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi, akses terhadap pekerjaan, dan perubahan sosial-ekonomi dapat menjadi penyebab peningkatan jumlah



Penduduk Miskin. saran yang dapat diberikan adalah perlunya analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan jumlah Penduduk Miskin di Palangkaraya, serta perlu adanya upaya konkret dalam menghadapi perubahan ekonomi dan sosial untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin, seperti penguatan sektor ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, program sosial dan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, serta upaya mitigasi risiko ekonomi. Dalam implementasinya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu ditingkatkan untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan jumlah Penduduk Miskin di Palangkaraya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aurelya, T., Nurhayati, N., & Purba, S. F. (2022). Pengaruh Kondisi Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 83-92.
- Bhegawati, D. A. S., & Novarini, N. N. A. (2023). Percepatan Inklusi Keuangan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, dan Merata Di Era Presidensi G20. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK)*, 3(1), 14-31.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2015-2020. *JURNAL ECONOMINA*, 2(2), 612-621.
- Setda.kalteng.go.id, Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemprov Kalteng Gelar Sosialisasi dan Pelatihan IPKD Tahun 2022, Diakses Pada 17 April 2023
- Subianto, P., & Irawan, I. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya. *Edunomics Journal*, 3(1), 31-43.
- YECCI NOENG, A. M. A. N. D. A. (2022). FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2016-2020) (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).